

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Persaingan di dunia bisnis dalam meningkatkan investasi dari pihak eksternal menuntut perusahaan untuk meningkatkan *performance* laporan keuangan (Yuliana, Masitoh dan Rachmawati, 2019). Laporan keuangan merupakan suatu penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut PSAK Nomor 1 Tahun 2009, tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Qonitin dan Yudowati, 2018). Laporan keuangan juga menjadi alat informasi utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen. Karena kinerja manajemen tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Penyampaian informasi melalui laporan keuangan ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan (Kartika dan Nurhayati, 2018). Oleh karena itu, informasi keuangan yang disajikan harus sesuai dengan keadaan riil dan bersifat relevan sehingga memberikan manfaat bagi penerima informasi. Relevan artinya dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan pengharapan para pengambil keputusan. Informasi dalam laporan keuangan juga harus memiliki kualitas andal yaitu tidak

menyesatkan, tidak ada kesalahan materiil dan dapat mengandung informasi yang jujur dan disajikan secara wajar (SAK 2004). (Kartika dan Nurhayati, 2018).

Menurut Darmawan (2018) laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki integritas dalam penyajiannya. Penyajian laporan keuangan yang memiliki integritas akan melindungi hak-hak *stakeholder*, karena mereka bisa mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya bukan laporan keuangan yang telah dimanipulasi dan menyesatkan. Selain itu, laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi juga membantu mereka mengambil keputusan yang terkait dengan investasi.

Terdapat beberapa fenomena skandal akuntansi yang terjadi yang menunjukkan suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan yaitu kasus PT. Toshiba. Pada bulan Mei 2015, Toshiba mengejutkan seluruh dunia saat menyatakan bahwa perusahaannya tengah melakukan investigasi atas skandal akuntansi internal dan harus merevisi perhitungan laba dalam 3 tahun terakhir. Pengumuman tersebut sangat tidak disangka karena Toshiba telah menjadi lambang perusahaan Jepang yang sangat kuat. Setelah diinvestigasi secara menyeluruh, diketahuilah bahwa Toshiba telah kesulitan mencapai target keuntungan bisnis sejak tahun 2008 di mana pada saat tengah terjadi krisis global. Krisis tersebut juga melanda usaha Toshiba hingga akhirnya Toshiba melakukan suatu kebohongan melalui *accounting fraud* senilai 1.22 milyar dolar Amerika. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai upaya sehingga menghasilkan laba yang tidak sesuai dengan realita.

Pada tanggal 21 Juli 2015, CEO Hisao Tanaka mengumumkan pengunduran dirinya terkait skandal akunting yang ia sebut sebagai peristiwa yang paling merusak merek Toshiba sepanjang 140 tahun sejarah berdirinya Toshiba. Pada akhir tahun 2015, Toshiba telah merugi sebesar 8 milyar dolar Amerika. Terbongkarnya kasus ini diawali saat audit pihak ketiga melakukan investigasi internal terhadap keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa manajemen perusahaan menetapkan target laba yang tidak realistis sehingga saat target tersebut tidak tercapai, pemimpin divisi terpaksa harus berbohong dengan memanipulasi data laporan keuangan ([www.integrity-indonesia.com](http://www.integrity-indonesia.com), 2017).

Tidak hanya itu, beberapa kasus mengenai laporan keuangan yang disajikan secara tidak wajar juga terjadi pada PT. Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2001 silam, berdasarkan pernyataan Robinson Simbolon, Kepala Biro Hukum Bapepam, seperti diketahui, Kimia Farma diketahui melakukan *mark up* laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut, Kimia Farma menyebut berhasil meraup laba sebesar Rp. 132 miliar. Namun, perusahaan farmasi tersebut pada tahun 2001 sebenarnya hanya mendapatkan untung sebesar Rp. 99 miliar (wordpress.com, 2009).

Kasus manipulasi data keuangan yang banyak terjadi dapat membuktikan bahwa kurangnya integritas laporan keuangan dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan. Integritas laporan keuangan

adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur (Saksakotama dan Cahyonowati, 2014). Pihak manajemen memiliki tanggung jawab atas kebenaran dan integritas laporan keuangan yang dimilikinya. Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* (keandalan) dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Keandalan suatu informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan atau peristiwa yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Istiantoro, Paminto dan Ramadhani, 2017)

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan diantaranya yaitu manajemen laba dan *corporate governance*. Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal, intervensi tersebut berupa kebijakan meratakan, menaikkan, atau menurunkan pelaporan laba. Manajemen dapat memanfaatkan kelonggaran di dalam penggunaan metode akuntansi, dan membuat kebijakan-kebijakan (*discretionary*) yang dapat mempercepat pengakuan pendapatan atau menunda pengakuan biaya, agar laba perusahaan yang dilaporkan menjadi lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan (Perdana, 2018).

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No.1, informasi laba merupakan indikator untuk mengukur kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan serta membantu pemilik untuk memperkirakan *earnings power* perusahaan dimasa yang akan datang. Informasi laba juga digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, menentukan besaran kompensasi manajer, dan pengambilan keputusan internal. Oleh karena itu, manajer akan melakukan manajemen laba agar tujuan yang diharapkan tercapai (Salim dan Marietza, 2017).

Manajemen laba disebabkan karena adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat menjadi pemicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Misalnya, manajer berkewajiban memberikan pengungkapan informasi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal karena berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya, misalnya kurang dalam penguasaan informasi dalam sebuah perusahaan. Pentingnya informasi dalam laporan keuangan mengakibatkan laporan keuangan rentan direayasa dalam praktik manajemen laba. Pihak manajemen melakukan rekayasa laporan keuangan sehingga memberikan informasi yang keliru bagi pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan (Yuliana dkk, 2019).

Menurut Healy dan Wahlen's (1999) dalam (Salim dan Marietza, 2017) manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan

dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan baik untuk menyatukan interpretasi beberapa stakeholder tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi kontrak yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan pada laporan keuangan. Karena itulah manajer perusahaan seringkali melakukan manajemen laba dengan berbagai cara guna merebut hati para investor. Sehingga adanya praktik manajemen laba akan mengurangi adanya integritas dalam penyajian laporan keuangan perusahaan (Yuliana dkk, 2019).

Ada beberapa proksi untuk mengukur manajemen laba seperti *Analyst Forecast*, *Unexpected Revenue Per Employee*, *Abnormal Book-Tax Differences*, dan *Discretionary Accruals* (Salim dan Marietza, 2017). Pada penelitian ini manajemen laba diukur dengan *Discretionary Accruals* (model perhitungan *Modified Jones Model*). Yaitu yang mengukur nilai akrual diskresioner yang diprosikan dalam bentuk nilai *error term* dari persamaan regresi total akrual. Akrual diskresioner merupakan kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan pada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel. Manajemen memanipulasi laba yang dilaporkan dengan memanfaatkan transaksi akrual diskresioner. Adanya korelasi antara kinerja laba perusahaan dengan akrual diskresioner. Perusahaan dengan pendapatan rendah cenderung menunjukkan akrual diskresioner negatif. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menunjukkan akrual diskresioner positif. Tampaknya hal ini terjadi karena perusahaan dengan pendapatan tinggi atau rendah yang bersifat

abnormal memiliki efek positif atau negatif terhadap laba yang mencakup komponen akrual (Perdana, 2018). Dalam arti lain bahwa semakin tinggi nilai akrual diskresioner maka berarti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Muid (2012) dan Putri dkk (2017) menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan penelitian oleh Sari dan Rahayu (2014) menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar (2014) serta Lubis, Fujianti dan Amyulianthy (2018) yang menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Namun, berbeda halnya dengan penelitian oleh Latifah (2015), Yuliana dkk (2019) dan Khatijah (2019) menyimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah *corporate governance*. Terbuktinya masalah manipulasi data akuntansi menyebabkan timbulnya banyak pertanyaan bagi masyarakat luas terhadap berbagai pihak terutama sistem pengelolaan dalam perusahaan dan sistem kepemilikan yang tersebar secara luas yang sering disebut dengan istilah *corporate governance*, yang memberitahukan kenyataan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang baik belum diterapkan pada perusahaan. Untuk memperoleh informasi yang lebih andal (*reliable*) agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi serta dapat berguna

untuk kepentingan orang banyak maka perlu dilakukan pengawasan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, pengawasan yang dilakukan adalah dengan menerapkan *corporate governance* yang terstruktur dan tertata dengan baik dengan konsep *Good Corporate Governance* (Istiantoro, Paminto dan Ramadhani, 2017).

Dalam teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak agen dan prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik yang mempengaruhi laporan keuangan. Pihak manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba sesuai dengan tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan prinsipal salah satunya dengan cara melakukan kecurangan laporan keuangan. Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme *corporate governance* yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan akan berkurang. Beberapa mekanisme *corporate governance*, seperti mekanisme internal yaitu kepemilikan manajerial serta mekanisme eksternal yaitu komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional yang diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Salim dan Marietza, 2017). Keempat struktur *corporate governance* tersebut pada perusahaan yang mempunyai peranan dan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring (Istiantoro dkk, 2017).

Dengan penerapan praktek *corporate governance* yang dilakukan perusahaan maka diharapkan dapat mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang bersifat opportunistik sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan integritas yang tinggi. Prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang diperlukan untuk terselenggarakannya praktek *corporate governance* adalah transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini diprosikan dalam empat struktur komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Komisaris independen mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi. Adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Komisaris yang berasal dari luar tidak memiliki kepentingan terhadap pihak internal perusahaan, akan melakukan pengawasan lebih independen (Salim dan Marietza, 2017). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saksakotama dan Cahyonowati (2014) serta Wulandari dan Budiarta (2014) sejalan dengan hasil penelitian oleh Verya (2017), Priharta (2017), Mais dan Nuari (2016), Irawati dan Fakhruddin (2016), Dewi dan Putra (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan penelitian oleh Yuliana dkk

(2019) dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Qonitin dkk (2018), Lestari, Harimurti dan Widarno (2018), Maghfiroh dkk (2018), Sukarmanto dan Purnamasari (2018), Kartika dan Nurhayati (2018), Akram, Basuki dan Budiyanto (2017), Istiantoro, Paminto dan Ramdhani (2017), Mudasetia dan Sholikhah (2017) menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan keintegritasan laporan keuangan (Salim dan Marietza, 2017). Agar independensinya tetap terjaga, salah satu anggota komite audit harus berasal dari komisaris independen. Anggota lainnya yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen (Saksakotama dan Cahyonowati, 2014). Sehingga semakin tinggi proporsi komite audit independen maka semakin tinggi tingkat integritas laporan keuangan suatu perusahaan (Salim dan Marietza, 2017). Penelitian oleh Akram dkk (2017) mendukung hasil penelitian Verya (2017) serta Istiantoro dkk (2017) yang menyimpulkan dalam hasil penelitiannya bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sementara penelitian lain oleh Khatijah (2019), Kartika dkk (2018), Qonitin dkk (2018), dan Setiawan (2016) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Berbeda dengan

penelitian lain yaitu oleh Maghfiroh dkk (2018), Lestari dkk (2018), Mudasetia dan Sholihah (2017), Irawati dan Fakhruddin (2016), Qoyyimah dkk (2015), Sari dan Rahayu (2014), serta Saksakotama dan Cahyonowati (2014) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain. Pengawasan kepemilikan institusional yang dilakukan investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Apabila investasi yang dilakukan besar, maka ada kemungkinan fungsi kepemilikan institusional oleh investor institusi dalam mengawasi perilaku manajemen berjalan maksimal (Subagyo dkk, 2018: 47). Sehingga, keintegritasan laporan keuangan suatu perusahaan kemungkinan tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukanto dan Widayanti (2018), Priharta (2017), Akram dkk (2017), Verya (2017) serta Dewi dan Putra (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sementara penelitian oleh Istiantoro dkk (2017), dan Mais dan Nuari (2016) serta Pratama (2015), kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Berbeda halnya dengan penelitian Yuliana dkk (2019), Lestari dkk (2018), Maghfiroh dkk (2018), Qonitin dkk (2018), Mudasetia dan Sholihah (2017), Irawati dan Fakhruddin (2016), Qoyyimah dkk (2015), dan Sari dan Rahayu (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal atau manajemen (Subagyo dkk, 2018:46-47). Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin tinggi integritas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika dkk (2018) dan Verya (2017) mendukung hasil penelitian Dewi dan Putra (2016), Saksakotama dan Cahyonowati (2014), serta Akram dkk (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sementara berdasarkan penelitian oleh Setiawan (2016), Widodo (2016), serta Siregar (2014), menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dkk (2019), Lestari dkk (2018), Maghfiroh dkk (2018), Istiantoro dkk (2017) serta Qoyyimah dkk (2015), menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, Masitoh dan Rachmawati (2019) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Manajemen Laba terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018”. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada tahun amatan penelitian dan pengukuran variabel operasional. Jika pada penelitian sebelumnya mengambil tahun amatan penelitian periode 2015-2017 sedangkan pada penelitian ini mengambil tahun amatan penelitian periode 2016-2018.

Motivasi penelitian ini adalah menemukan konsistensi mengenai hasil dari pengaruh manajemen laba yang di proksikan dengan *discretionary accrual* dan *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit, berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti-bukti empiris mengenai manajemen laba, *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah manajemen laba berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan ?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan ?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan ?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan ?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Dari berbagai faktor, yang akan digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya menggunakan manajemen laba dan corporate governance yang diproksikan dengan empat variabel yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Dalam penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh negatif manajemen laba terhadap integritas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh positif komite audit terhadap integritas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh positif kepemilikan institusional.
5. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan” adalah :

### 1. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam berkaitan dengan manajemen laba dan *corporate governance* yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan.

### 2. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi salah satu referensi pembuatan kebijakan perusahaan pihak internal perusahaan khususnya bagian manajemen mengenai integritas laporan keuangan dalam rangka memberikan sinyal kepada pasar mengenai manajemen laba dan *corporate governance*.

### 3. Bagi Investor dan Calon Investor

Dapat membantu dalam menganalisis mengenai manajemen laba dan *corporate governance*, yang kemudian dapat membantu pengambilan keputusan investasi.